



DINAS SOSIAL
PROVINSI GORONTALO

RENJA

Rencana Kerja 2026

JL. BIRGJEN PIOLA ISA KEL. DULOMO SELATAN
KECAMATAN KOTA UTARA KOTA GORONTALO

✉ dinsosprovgto34@gmail.com

🌐 dinsos.gorontaloprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 ini dapat disusun. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka menuju "Gorontalo Maju dan Sejahtera".

Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.

Gorontalo, Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo



Sagita Wartabone, ST, MM
Nip. 197112052002122006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN	
2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas	
Sosial	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah.....	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran	54
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	85
BAB V PENUTUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 adalah dokumen rencana tahunan yang mempunyai arti strategis dalam mendukung pelaksanaan program tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Gorontalo.
2. Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan acuan untuk mengusulkan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2026.

Mengingat Renja sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai Rencana Kerja yang mempunyai arti strategis dalam pembangunan daerah, secara umum Dinas Sosial diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam 1 (satu) tahun ke depan.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu, Renja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo merupakan salah satu perangkat dasar untuk tercapainya pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disusun atas dasar mandat dan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
22. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38)
23. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 12 Tahun 2025 tentang RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari Program Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk Tahun 2026.

Disamping itu rencana kerja Perangkat Daerah disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
2. Sebagai pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah,
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan,
4. Sebagai instrument dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini memberi ulasan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial, serta berisikan Program dan Kegiatan Dinas.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo serta rencana anggaran yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi yang dapat diidentifikasi dengan 2 hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan program/kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan program/kegiatan tersebut. Hasil evaluasi sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan program/kegiatan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Sosial berikutnya tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung, yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib dan Belanja Langsung Urusan Pilihan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C. 29 berikut ini.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Gorontalo**

Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja (n-2)	Realisasi Renja tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur dan perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
1.06.01.1.01	<i>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, monev dan pelaporan yang dihasilkan</i>	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100 %	8 dok	24 dok	6 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	3 dok	0,75 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %	1 dok	5 dok	1,25 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 lap	8 lap	8 lap	8 lap	100 %	5 lap	21 lap	5,25 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	4 lap	3 lap	3 lap	100 %	1 lap	8 lap	2 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase (%) kesesuaian laporan keuangan	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100 %	300 %	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 org	71 org	73 org	70 org	95,89 %	71 org	212 org	53 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	3 dok	0,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100 %	1 lap	3 dok	0,75%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	71 Org	0	1 Paket	1 paket	100 %	71 paket	72 paket	18 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 org	26 org	2 Org	15 org	100 %	4 org	45 org	11,25
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase (%) sarana dan prasarana yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 dok	0,75%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 dok	0,75%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 dok	0,75%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 dok	0,75%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	3 dok	0,75%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100 %	1 lap	3 lap	0,75%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100 %	1 lap	3 lap	0,75%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	1 paket	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	0,25 %
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 paket	0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	0,25 %
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lap	1 lap	3 lap	8 lap	100 %	1 lap	10 lap	2,5 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	1 lap	1 lap	12 lap	100 %	1 lap	14 lap	3,5 %
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	3 Unit	0,75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100 %	14 Unit	42 Unit	10,5 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	55 Unit	55 Unit	100 %	55 Unit	165 Unit	41,25 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	3 Unit	0,75%
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan, Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan, Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi PUB dan UGB	5 dok	12 dok	12 dok	6 dok	50 %	12 dok	30 dok	7,5 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dok	6 dok	12 dok	6 dok	50 %	12 dok	30 dok	7,5 %
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS perorangan yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	137 org	137 org	137 org	107 org	78,10 %	77 org	321 org	80,25 %
		Jumlah kelembagaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	53 lembaga	41 lembaga	53 lembaga	92 lembaga	100 %	25 lembaga	158 lembaga	39,5 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 org	77 org	77 org	77 org	100 %	77 org	231 org	57,75 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	53 lembaga	65 lembaga	92 lembaga	92 lembaga	100 %	25 lembaga	182 lembaga	45,5 %
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	16 org	15 org	16 org	6 org	37,5 %	10 org	31 org	7,75 %
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah pekerja migran Korban Tindak Kekerasan yang dilayani	16 org	15 org	16 org	6 org	37,5 %	10 org	31 org	7,75 %
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	16 org	5 org	16 org	6 org	37,5 %	10 org	31 org	7,75 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Pesertanse (%) penyandang disabilitas terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100 %	100 %	100 %	40 %	40 %	100 %	240 %	60 %
		Pesertanse (%) anak terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
		Pesertanse (%) lanjut usia terlantar, lanjut usia terlantar, yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
		Pesertanse (%) anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandang dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi social	12 org	10 org	10 org	4 org	40 %	10 org	24 Org	6 %
	Penyediaan permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	12 org	0	10 org	4 org	40 %	10 org	14 org	3,5 %
	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	12 org	15 org	10 org	4 org	40 %	10 org	29 org	7,25 %
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	12 org	0	10 org	4 org	40 %	10 org	14 org	3,5 %
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	12 org	0	10 org	4 org	40 %	10 org	14 org	3,5 %
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	12 org	0	10 org	4 org	40 %	10 org	14 org	3,5 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	12 org	0	0	0	0	10 org	4 org	2,5 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %	2 dok	6 dok	1,5
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh pendampingan layanan sosial	30 org	60 org	30 org	45 org	100 %	45 org	150 org	37,5 %
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 org	60 org	30 org	45 org	100 %	45 org	150 org	37,5 %
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 org	0	0	0	0	45 org	45 org	11,25 %
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 org	0	0	0	0	45 org	45 org	11,25 %
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 org	0	0	0	0	45 org	45 org	11,25 %
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	30 org	0	30 org	45 org	100 %	45 org	90 org	22,5 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar anak Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %	2 dok	6 dok	1,5 %
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant	Jumlah Lanjut usia Terlantar yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial	27 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	69 org	17,25 %
	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	27 Org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	69 org	17,25 %
	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	27 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	69 org	17,25 %
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	27 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	69 org	17,25 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	27 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	69 org	17,25 %
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	27 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	69 org	17,25 %
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	27 org	23 org	23 org	23 org	100 %	23 org	69 org	17,25 %
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	27 org	0	0	0	0	23 org	23 org	5,75 %
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	27 org	0	5 org	6 org	100 %	23 org	29 org	7,25 %
	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	2 org	4 org	2 org	2 org	100 %	4 org	10 org	2,5 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	2 dok	2 dok	4 dok	100 %	2 dok	8 dok	2 %
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah dokumen rehabilitasi sosial PMKS diluar HIV/AIDS dan Napza	1 dok	1 dok	1 dok	3 dok	100 %	1 dok	4 dok	1 %
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Provinsi	1 dok	1 dok	1 dok	3 dok	100 %	1 dok	4 dok	1 %

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Persentase (%) Keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya, Persentase (%) fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	20 rekomendasi	20 rekomendasi	20 rekomendasi	17 rekomendasi	85 %	20 rekomendasi	57 rekomendasi	14,25%
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah rekomendasi dan/atau izin pengangkatan anak yang dihasilkan	20 org	24 org	20 rekomendasi	17 rekomendasi	85 %	20 rekomendasi	61 rekomendasi	15,25 %
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	10.520 Keluarga	10.650 KPM	10.520 Keluarga	23.532 KPM	100 %	11.151 Keluarga	45.333 Keluarga	11.333
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	10.000 Keluarga	40.000 KPM	10.000 Keluarga	23.000 Keluarga	100 %	11.000 Keluarga	74.000	18,500
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	500 Keluarga	2.995 KPM	500 Keluarga	532 Keluarga	100 %	145 Keluarga	3.672	918 %
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	20 org	0	20 org	15 Org	75 %	6 org	21 org	5,25 %
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani dan terlayani	1.400 org	270 org	1.500 org	54.094 org	100 %	1.400 org	55.764 Org	13.941
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap darurat	1.400 org	270 org	1.500 org	54.094 org	100 %	1.400 org	55.764 Org	13.941

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1.400 org	0	1.500 org	54.094 org	100 %	1.300 org	55.394	13.848
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi-an) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 org	270	500 org	450 org	90 %	500 org	1.220	305
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1 unit	0	1 unit	2 unit	100 %	1 unit	2	0,5
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 org	0	200 org	90 org	45 %	100 org	190	47,5
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 org	0	300 org	0	0	200 org	200	50
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300 %	100 %
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola	2 makam	2 makam	2 makam	2 makam	100 %	2 makam	6 Makam	1,5 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 makam	2 makam	2 makam	2 makam	100 %	2 makam	6 Makam	1,5 %

Pada Tabel T-C29 menunjukkan hasil capaian renstra dan renja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dari sampai dengan tahun 2023 dan capaian renja tahun 2024. Capaian renja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo cukup baik meskipun terdapat beberapa capaian kinerja kurang optimal, namun ada pula yang capaian kinerjanya melampaui target.

A. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2024 terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal dan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.

Adapun rincian capaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Target kinerja Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal pada Tahun 2024 sebesar 20 rekomendasi dengan realisasi sejumlah 17 sesuai dengan dokumen rekomendasi kabupaten/kota.

2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga

Sub kegiatan ini difokuskan pada pemberian bantuan pangan kepada keluarga miskin sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menyasar keluarga miskin yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo sejumlah 10.000 KPM dengan realisasi 100 %. Selanjutnya pada Tahun 2024 program ini berlanjut dengan target sasaran masyarakat miskin yang terdata pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022, sebagai tindak lanjut Pemerintah Provinsi Gorontalo atas Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dinas Sosial mengambil peran sesuai fungsi dan tugasnya dalam Instruksi tersebut untuk memberikan program pemenuhan kebutuhan dasar. Olehnya target sasaran pada Tahun 2024 sebagaimana anggaran yang tersedia Dinas Sosial memberikan bantuan sejumlah 23.000 dengan realisasi 100%. Dampak dari pemberian bantuan pangan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem di Provinsi Gorontalo sebesar 2,48 %. Pada Tahun 2025 Dinas Sosial kembali melanjutkan Program Pemenuhan Kebutuhan Pokok bagi masyarakat miskin ekstrem dengan sasaran 9.000 KPM dan sudah terealisasi 100 % pada triwulan kedua tahun ini.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif dengan kelompok sasaran keluarga fakir miskin dan perempuan yang menjadi kepala keluarga dengan target kinerja sebesar 500 KPM. Capaian kinerja pada Tahun 2024 sebesar 532 KPM (524 KPM APBD Induk & 8 KPM APBD-P) dan semuanya telah tersalurkan bantuannya (100%) dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 1.330.000.000. melampaui target yang telah ditetapkan. Terjadinya pelampauan target disebabkan adanya penambahan anggaran, hal ini berdasarkan aspirasi masyarakat.

B. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan

Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan dititikberatkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan kelompok sasaran adalah pekerja migran

lintas provinsi dan lokal yang mengalami masalah sosial, termasuk orang yang terlantar karena kehabisan atau kehilangan bekal dan/atau harta benda dalam perjalanan.

Pada Tahun 2024 Dinas Sosial telah mengalokasikan anggaran pada kegiatan pemulangan warga terlantar untuk mengakomodir 16 klien, dimana realisasi pelaksanaan pemulangan warga terlantar sebanyak 6 orang klien ke daerah asal sesuai hasil rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya.

C. Program Pemberdayaan Sosial

1. Kegiatan Penerbitan Ijin Pengumpulan Sumbangan Lintas Kabupaten/Kota, dari target 12 rekomendasi/ijin pengumpulan sumbangan yang diterbitkan, terealisasi 6 rekomendasi atau 50 %. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan oleh kurangnya animo pelaku usaha dan masyarakat dalam pengurusan ijin baik undian gratis berhadiah maupun ijin pengumpulan sumbangan karena dalam pengurusannya sampai ke tingkat pusat (Kementerian Sosial RI). Tidak tercapainya target kinerja ini tentu akan berpengaruh terhadap pemasukkan negara dari sektor non pajak, yang seharusnya bisa digunakan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

Untuk Tahun 2025, sudah dianggarkan kegiatan sosialisasi terkait penyelenggaraan UGB dan PUB kepada dunia usaha dan masyarakat yang akan melaksanakan PUB.

2. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari pemberdayaan yang bersifat perorangan dan kelembagaan. Pada pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari target kinerja yang ditetapkan 137 orang terealisasi 110 orang atau 80,29%. Tidak tercapainya target kinerja antara lain karena semakin sulitnya untuk mencari relawan sosial (PSM) yang mau bekerja tanpa pamrih dan imbalan. Adapun pada pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang bersifat kelembagaan seperti Karang Taruna dan

WKSBM/Rukun Duka dari target 41 lembaga yang diberikan bantuan sosial, terealisasi sebanyak 92 lembaga dari target yang telah ditetapkan.

Target bantuan sosial WKSBM meningkat dari 41 menjadi 92 karena adanya penambahan jumlah WKSBM yang telah memenuhi persyaratan administratif, peningkatan usulan dari masyarakat, serta dukungan anggaran yang lebih besar sehingga memungkinkan perluasan penerima manfaat. Selain itu, kenaikan target ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran WKSBM dalam mendukung program kesejahteraan sosial berbasis komunitas. Peningkatan target tersebut juga didorong oleh banyaknya proposal yang diajukan WKSBM serta ketersediaan anggaran yang memadai untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

D. Program Rehabilitasi Sosial

Dalam penanganan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, dilaksanakannya melalui Program Rehabilitasi Sosial yang meliputi :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Tahun 2024 dilaksanakan melalui Griya Jannati dengan jumlah penerima pelayanan sosial sebanyak 23 orang sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti pada tahun 2024 diberikan kepada 45 orang anak terlantar yang ada di panti milik masyarakat dengan capaian kinerja 100 %.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti pada tahun 2024 sudah melaksanakan pelayanan namun dari target 10 Orang yang diberikan hanya 4 orang dikarenakan Panti Disabilitas mulai beroperasi pada bulan September 2024. Target tersebut tidak terpenuhi dikarenakan berdasarkan hasil asesment disabilitas yang memerlukan layanan dalam panti tersebut tidak bersedia untuk tinggal dalam panti disabilitas terlantar.

4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya Diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti berupa pemberian hibah kepada IPWL Ummu Syahidah dapat dilaksanakan 100 %.
- E. Program Penanganan Bencana
Dalam penanganan bencana dilakukan melalui Program Penanganan Korban Bencana, Tahun 2024 dengan target 1.500 orang korban bencana dengan capaian kinerja 54.094 orang atau melebihi dari target dikarenakan dapat bantuan dari pemerintah pusat.
- F. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Dalam pelestarian nilai kepahlawanan dilakukan melalui Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan target 2 makam tercapai 100 %. Terdapat 2 (dua) makam, yaitu Makam Pahlawan Nasional (MPN) Nani Wartabone di Suwawa dan Taman Makam Pahlawan (TMP) di Pentadio.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial, dalam mengukur tingkat capaian kinerja sesuai dengan pedoman yang ada yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK) .

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	81,82 %	96,36 %	100 %	100 %	
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	83,33 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98,33 %	100%	100 %	100 %	
4	Persentase (%) Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		100 %	0	0	0	100%	0	0	100 %	100%	Kegiatan tidak dilaksanakan
5	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	88,00 %	96%	100 %	100 %	

Dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, pada Tahun 2024 melaksanakan 4 jenis layanan yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti dan perlindungan sosial korban bencana. Indeks pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 sebesar 98,47 %.

Adapun perincian pencapaian kinerja sebagai berikut;

1. Indikator Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dari target 100 % tercapai sebesar 96,36 %.

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas di dalam panti sudah dilaksanakan namun belum semua mutu layanan terpenuhi dikarenakan Panti Disabilitas mulai beroperasi pada bulan September 2024.

2. Indikator Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dari target 100 % sudah tercapai sebesar 100 %. Rehabilitasi sosial anak terlantar didalam panti masih bekerja sama dengan panti milik masyarakat yakni LKSA Al Inayah 23 orang, LKSA Darul Mutmain Tabong 22 orang, RPSA Amal Sholeh 2 orang dan LKS Ummu Syahidah 5 Orang.

3. Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dari target 100 % sudah mencapai target sebesar 100%. Dari aspek penerima pelayanan (bobot 80 %) dengan target 23 orang tercapai 100 %. Pada aspek pemenuhan mutu minimal layanan dasar (bobot 20 %), dari 12 mutu minimal layanan semua sudah terpenuhi sehingga capaian mencapai 100%.

4. Persentase (%) Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti tidak dilaksanakan sehingga capaiannya menjadi 0 %.

Jenis dan mutu minimal layanan ini tidak dilaksanakan karena belum ada PMKS Gelandangan dan Pengemis di Provinsi Gorontalo.

5. Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dari target 100 % tercapai sebesar 96,00 %. Dikarenakan ada 5 jenis mutu layanan dan hanya 1 yang tidak terpenuhi sehingga tidak mencapai target.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai perangkat daerah memiliki tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan pemerintah pusat dalam hal ini dengan kementerian teknis yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun dengan pemerintah kabupaten/kota melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan. Sinergitas program/kegiatan tersebut sebagaimana berikut :

Kementerian Sosial RI	Dinas Sosial Provinsi	Dinas Sosial Kab/Kota
Program Perlindungan Sosial 1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat 2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial 3. Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 4. Kegiatan Rehsos Korban bagi Penyandang Disabilitas 5. Kegiatan Rehsos Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang 6. Kegiatan Rehsos Anak 7. Kegiatan Rehsos Lanjut Usia 8. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 9. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 10. Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga 11. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin	1. Program Pemberdayaan Sosial a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi. 2. Program Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti d. Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga b. Pengelolaan Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Penanganan Bencana a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1. Program Pemberdayaan Sosial a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Program 2. Program Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial b. Program Penanganan Bencana a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

- a. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan :

1. Permasalahan kesejahteraan sosial dengan berbagai ragam permasalahannya;
2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kurang valid;
3. Taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang masih rendah;
4. Kualitas layanan yang belum berkualitas oleh penyelenggaran kesejahteraan sosial
5. Masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hambatan :

1. Keterbatasan alokasi anggaran;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum maksimal karena faktor keterbatasan sarana dan prasarana yang masih dengan status menyewa dan dengan fasilitas tidak sesuai standar sebagaimana seharusnya sebuah Panti Rehabilitasi Sosial;
3. Kelembagaan Panti Rehabilitasi Sosial juga menjadi salah satu kendala sehingga penerapan SPM tidak maksimal;
4. Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan kesejahteraan sosial yang belum terlatih, belum berpengalaman dan belum tersertifikasi juga menjadi salah satu kendala dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Dari uraian diatas, maka itu isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Sosial pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan

Provinsi Gorontalo berada di urutan ke-5 sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Tahun 2023 tingkat kemiskinan

Provinsi Gorontalo masih berada diangka 15,15 persen, di tahun 2024 mengalami penurunan 0,58% dan berada diangka 13,87%. Berbagai upaya tentunya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kemiskinan, hanya saja yang menjadi poin penting dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan adalah bagaimana strategi penanggulangannya harus dilakukan secara konvergen oleh semua pihak mulai dari proses perencanaan hingga pada tahapan intervensinya. Dinas Sosial sebagai salah satu OPD pengampu program kemiskinan selalu berupaya maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam merencanakan dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan baik dengan pendekatan pengurangan beban keluarga maupun dalam pendekatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Hal tersebut mungkin tidak memberikan dampak berdampak secara signifikan mengingat ketersediaan sumberdaya yang ada tidak berbanding lurus dengan sasaran yang jumlahnya sangat besar dan beragam serta aspek penanggulangannya juga bersifat multidimensi. Jika melihat pada data yang ada, akar permasalahan kemiskinan di Provinsi Gorontalo khususnya di wilayah Perdesaan cukup tinggi yaitu pada sektor pertanian dengan sebaran rumah tangga miskin sebesar 63 %. Sedangkan di Perkotaan tingkat kemiskinan dan ketimpangan berangsur membaik, hanya saja dibutuhkan peningkatan program jaminan sosial agar masyarakat menengah dan rentan tidak jatuh dibawah garis kemiskinan.

Menyikapi fakta tersebut diatas, kita harus memberikan perhatian khusus dalam menyusun strategi agar angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo bisa terus menurun seiring dengan penurunan angka kemiskinan secara nasional. Hal ini dapat kita lakukan dengan melakukan integrasi lintas sektor dalam menyusun dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 53 Tahun 2020.

Dokumen perencanaan daerah harus dipastikan mengakomodir program-program penanggulangan kemiskinan dimulai dari Rencana Aksi Tahunan (RAT) yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD dan menjadi bagian

dalam dokumen RPJMD yang kemudian menjadi landasan operasional dokumen RENSTRA dan RENJA. Selanjutnya yang menjadi poin utama dalam setiap tahapan ini yaitu TAPD juga memastikan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan dapat terakomodir dalam dokumen penganggaran daerah, agar apa yang sudah direncanakan oleh para pengampu program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Pemutakhiran data, baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota

Data adalah aspek utama yang dijadikan dasar dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Dalam perencanaannya dibutuhkan data-data yang *up to date*, valid dan terukur.

Salah satu permasalahan penggunaan data yang kita hadapi saat ini adalah masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan sekarang (*up to date*). Kendala lainnya adalah koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai SKPD masih kurang, sehingga data-data yang harusnya saling berhubungan menjadi terpisah-pisah dan sulit untuk diakses.

Ketersediaan sumber data yang dibutuhkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan tidak didukung oleh regulasi yang membatasi akses pemanfaatannya, sehingga Pemerintah Daerah khususnya Dinas Sosial harus mencari sumber data alternatif dalam menyusun perencanaan khususnya pada program penanggulangan kemiskinan.

Saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak lagi dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan akses Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan data tersebut juga telah dibatasi sebagai pemantau data saja. Hal ini tentunya menjadi kendala serius bagi daerah karena program-program penanggulangan kemiskinan diwajibkan merujuk pada DTKS.

Munculnya data Pensasaran Percepatan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kemudian menjadi alternatif sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, akan tetapi basis datanya juga

masih banyak memiliki kekurangan disisi lain target Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem hanya dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Sumber data lain yang juga dapat di akses oleh Pemerintah Daerah saat ini adalah Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dapat dimanfaatkan melalui aplikasi SEPAKAT yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Secara struktur data dan aksesibilitasnya sumber data ini dinilai jauh lebih, akan tetapi juga terdapat beberapa kekurangan antara lain ; datanya belum terupdate sejak tahun 2022 dan regulasi pemanfaatan data REGSOSEK yang masih terbatas.

Olehnya permasalahan sumber data dan pemanfataannya dalam berbagai progam pelayanan sosial menjadi isu yang cukup penting dan diperlukan perhatian khusus.

3. Kapasitas dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang melibatkan empat sumber daya manusia yaitu Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Pekerja sosial masyarakat dan relawan sosial memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan program perlindungan sosial, membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan solusi yang sesuai.

Namun, tantangan muncul karena peningkatan kompetensi para pekerja sosial belum memadai dan tidak seimbang dengan peran yang mereka jalankan, mengakibatkan kualitas pendampingan program tidak optimal.

Disisi lain, penguatan peran TKSK dan optimalisasi fungsi relawan sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program. Pengembangan sistem informasi manajemen yang efektif juga diperlukan agar semua pihak dapat mengakses data dan informasi terkini, sehingga memudahkan koordinasi antar lembaga.

Selain itu, kurangnya informasi dan pemahaman dari pihak terkait mengenai pendampingan program menjadi persoalan yang berdampak pada fasilitas program ditingkat daerah, menghambat implementasi kebijakan dan mengurangi dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi yang melibatkan semua pihak untuk meningkatkan kapasitas dan efektifitas PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Standar Pelayanan Minimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penanganan Sosial PPKS belum optimal	Rehabilitasi Sosial PPKS dalam Panti belum memenuhi standar kualitas SPM	1. Belum tersedianya Panti Rehabilitasi Sosial 2. Keterbatasan sarpras panti belum memadai; 3. Kompetensi SDM panti belum memadai; 4. Pemenuhan kebutuhan dasar PM panti belum memadai.
	Belum terpenuhinya Jaminan Sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	1. Data sasaran penangan-an PPKS tersedia belum valid; 2. Pendampingan sosial belum optimal. 3. Belum terkoordinasinya sistem penanggulangan bencana

Terkait pelaksanaan SPM di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo :

- Keterbatasan sarana prasarana panti pelayanan sosial. Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan dasar (hak dasar) pada SPM Sosial Daerah Provinsi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Penerapan Tahapan pelaksanaan SPM belum optimal. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran yang diharapkan adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Panti kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial secara holistik, sistematis dan berstandar.

5. Koordinasi dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan perlindungan sosial belum terintegrasi serta prioritas pendanaan yang masih terbatas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 bahwa Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bertanggungjawab atas terwujudnya perlindungan sosial bagi masyarakat dimana pada RKPD telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada Tahun 2026.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dilakukan analisa kebutuhan terhadap masing-masing Bidang sehingga didapat usulan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan. Usulan yang diberikan oleh Bidang-bidang tersebut setelah dilakukan inventarisasi tidak ditemukan kegiatan baru dan perubahan nomenklatur kegiatan dan telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.15.5.1317 Tahun 2023.

Rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagaimana pada tabel T-C.31 berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap RKPD Tahun 2026
Provinsi Gorontalo

Dinas Sosial

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				22.657.620.192,-					22.657.620.192,-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.920.620.192,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi			11.920.620.192,-	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				766.000.000,-		<i>Provinsi</i>			766.000.000,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	570.000.000,-		Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	570.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	10.000.000,-		Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	10.000.000,-	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	45.000.000,-		Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	45.000.000,-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	141.000.000,-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	141.000.000,-	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				8.881.620.192,-	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Provinsi</i>			8.881.620.192,-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org/ bln	8.751.620.192,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 org	8.751.620.192,-	
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	106.000.000,-	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian /Verivifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	106.000.000,-	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	24.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	24.000.000,-	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				139.000.000,-	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Provinsi</i>			139.000.000,-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, semua Kel./Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 paket	28.000.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	70 paket	28.000.000,-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, semua Kel./Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 org	111.000.000,-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 org	111.000.000,-	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				154.000.000,-	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Provinsi</i>			154.000.000,-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000,-	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	26.000.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	26.000.000,-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	31.000.000,-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.000.000,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	19.000.000,-	
	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	6.000.000,-	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	6.000.000,-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	39.000.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	39.000.000,-	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	18.000.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	18.000.000,-	
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				597.000.000,-	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Provinsi</i>			597.000.000,-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	597.000.000,-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	597.000.000,-	
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				721.000.000,-	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Provinsi</i>			721.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 lap	240.000.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	240.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	481.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	481.000.000,-	

	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				662.000.000,-	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Provinsi</i>			662.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	85.000.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	85.000.000,-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	330.000.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	330.000.000,-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	122.000.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	122.000.000,-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	125.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	125.000.000,-	
	Program Pemberdayaan Sosial				1.310.000.000,-	Program Pemberdayaan Sosial	Provinsi			1.310.000.000,-	

	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				120.000.000,-	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi			120.000.000,-	
	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dok	120.000.000,-	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 dok	120.000.000,-	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				1.190.000.000,-	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Provinsi			1.190.000.000,-	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	107 Keluarga	790.000.000,-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	107 Keluarga	790.000.000,-	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	25 lembaga	400.000.000,-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	25 lembaga	400.000.000,-	

	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				150.000.000,-	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Provinsi			150.000.000,-	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal				150.000.000,-	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Provinsi			150.000.000,-	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	10 org	150.000.000,-	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Provinsi	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	10 org	150.000.000,-	
	Program Rehabilitasi Sosial				3.370.000.000 ,-	Program Rehabilitasi Sosial	Provinsi			3.370.000.000 0,-	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti				601.000.000,-	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti	Provinsi			601.000.000,-	

	Penyediaan permakanan	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 org	195.000.000,-	Penyediaan permakanan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 org	195.000.000,-	
	Penyediaan sandang	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 org	39.000.000,-	Penyediaan sandang	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 org	39.000.000,-	
	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 org	50.000.000,-	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	10 org	50.000.000,-	
	Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	10 org	2.000.000,-	Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	10 org	2.000.000,-	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup	10 org	218.000.000,-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-	Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari	10 org	218.000.000,-	

		Kecamatan Semua Kel/Desa	Sehari Hari Kewenangan Provinsi			hari		Kewenangan Provinsi			
	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Kab. Bone Bolango, Suwawa, Boludawa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	93.000.000,-	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	93.000.000,-	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1.103.000.000,-	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Provinsi			1.103.000.000,-	
	Penyediaan permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 org	574.000.000,-	Penyediaan permakanan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 org	574.000.000,-	
	Penyediaan sandang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 org	55.000.000,-	Penyediaan sandang	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 org	55.000.000,-	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Semua Kota/Kab, Semua	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	30 org	58.000.000,-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	30 org	58.000.000,-	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa	dan Sosial Kewenangan Provinsi			dan Sosial		dan Sosial Kewenangan Provinsi			
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	30 org	43.000.000,-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari- hari	Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	30 org	43.000.000,-	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	30 org	31.000.000,-	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	30 org	31.000.000,-	
	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	342.000.000,-	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	342.000.000,-	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti				1.320.000.000,-	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti	Provinsi			1.320.000.000 ,-	
	Penyediaan permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 org	300.000.000,-	Penyediaan permakanan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 org	300.000.000,-	
	Penyediaan sandang	Semua	Jumlah Orang	23 org	100.000.000,-	Penyediaan	Provinsi	Jumlah Orang yang	23 org	100.000.000,-	

		Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			sandang		Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi			
	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 org	170.000.000,-	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 org	170.000.000,-	
	Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	23 org	4.000.000,-	Penyediaan perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	23 org	4.000.000,-	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 org	256.000.000,-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 org	256.000.000,-	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	23 org	301.000.000,-	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	23 org	301.000.000,-	
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan	23 org	6.000.000,-	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	23 org	6.000.000,-	

		Semua Kel/Desa	Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi					Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi			
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 org	51.000.000,-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 org	51.000.000,-	
	Pemulasaraan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	4 org	20.000.000,-	Pemulasaraan	Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	4 org	20.000.000,-	
	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	112.000.000,-	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	112.000.000,-	
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				346.000.000,-	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Provinsi			346.000.000,-	

	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	346.000.000,-	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	2 dok	346.000.000,-	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				4.064.000.000,-	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab/kota			4.064.000.000,-	
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				127.000.000,-	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Provinsi			127.000.000,-	
	Pengangkatan Anak antar WNI	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	20 orang	127.000.000,-	Pengangkatan Anak antar WNI		Jumlah anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	20 orang	127.000.000,-	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				3.937.000.000,-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Kab/Kota			3.937.000.000,-	
	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	9.000 orang	3.108.000.000,-	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9.000 orang	3.108.000.000,-	

			Provinsi								
	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	145 Orang	694.000.000,-	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	145 Orang	694.000.000,-	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	6 org	135.000.000,-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	6 org	135.000.000,-	
	Program Penanganan Bencana				1.294.000.000,-	Program Penanganan Bencana	Provinsi			1.294.000.000,-	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi				1.294.000.000,-	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Provinsi			1.294.000.000,-	
	Penyediaan permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1.200 org	819.000.000,-	Penyediaan permakanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	1.200 org	819.000.000,-	
	Penyediaan sandang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan	500 org	245.000.000,-	Penyediaan sandang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	500 org	245.000.000,-	

		Kel/Desa	Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				n Semua Kel/Desa	Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi			
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang	140.000.000,-	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan n Semua Kel/Desa	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	100 Orang	140.000.000,-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 org	74.000.000,-	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan n Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 org	74.000.000,-	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 org	16.000.000,-	Pelayanan Dukungan Psikososial	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan n Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 org	16.000.000,-	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				549.000.000,-	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Provinsi			549.000.000,-	
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				549.000.000,-	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Provinsi			549.000.000,-	

						Nasional Provinsi					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	549.000.000,-	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Makam	549.000.000,-	

2.5 Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan dari bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi, dari penelitian lapangan dan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo diperoleh dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Tugas dan Fungsi Bidang yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sesuai dengan dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
2. Mengacu kepada Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah pada RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026;
3. Usulan kegiatan harus bersifat hasil (outcome) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun usulan program/dan kegiatan pemangku kepentingan Tahun 2026 sebagaimana dalam Tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pemberdayaan Sosial				
I.1	Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				
I.1.1	Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kelembagaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1	Bantuan LKSA
II.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial				
II.1.	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi				
II.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	3900 KPM	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)
II.1.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	405 KPM	Bantuan UEP/PEKKA
III	Program Rehabilitasi Sosial				
III.1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				
III.1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan	Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1 Lembaga Lansia	Bantuan Hibah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program terhadap prioritas nasional Tahun 2026, agar dapat tergambarkan dukungan program prioritas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional.

Sebagaimana Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 bahwa Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif"** dengan Sasaran Pembangunan yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Sosial antara lain :

- Sekolah Rakyat : Memutus Rantai Kemiskinan melalui Penyediaan Pendidikan Berkualitas untuk Anak dari Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem
- Pengentasan Kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif

Arah kebijakan pembangunan prioritas nasional 6 yang terdiri dari :

- Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui (i) sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; (ii) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (iii) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif.
- Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman.

Adapun penyelarasan prioritas pusat dan daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026 beserta dukungan Program Prioritas Tahun 2026

Prioritas RKP	Prioritas RKPD	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2026
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan Sumber Daya Manusia	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 6. Program Penanganan Bencana

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan publik dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial Tahun 2026 sebagaimana berikut :

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah
	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif
	Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Program Pemberdayaan Sosial
3	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
4	Rehabilitasi Sosial
5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
6	Program Penanganan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mendatang yaitu :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang inklusif ”

b. Sasaran.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Provinsi Gorontalo selang tahun 2026 yaitu :

“Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat”

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	53,79%
2.		Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat	Persentase masyarakat rentan yang mendapatkan perlindungan sosial	21,25%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM, SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan capaian program dan kegiatan.

1. Uraian tentang Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan Pengembangan daerah terisolir

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir adalah dengan mewujudkan tujuan dari misi kedua Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Melakukan Akselerasi Agar Gorontalo Keluar Dari Lima Provinsi Termiskin di Indonesia.

Untuk penanganan kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yakni :

- a. Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) dengan capaian tahun 2024 sebesar 100% dari target 10.000 KPM dan terealisasi 23.000 KPM.
- b. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan capaian tahun 2024 sebesar 100% dari target 500 KPM dan terealisasi sejumlah 532 KPM

Untuk Pemenuhan SPM yakni Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti.

Sedangkan Program dan kegiatan pemenuhan SPM lainnya yaitu Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

2. Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sebaran/lokasi dan sasaran kelompok masyarakat

Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2026 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 6 (enam) program wajib, 18 (delapan belas) kegiatan dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
- 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- 4. Program Rehabilitasi Sosial
- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 6. Program Penanganan Bencana
- 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sedangkan kegiatan sejumlah 18 (delapan belas) yaitu :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
8. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
9. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
10. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
11. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant
12. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant
13. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
14. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
15. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
16. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
17. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
18. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel TC-33. Pada tabel ini berisi hasil inputan dalam SIPD Renja Tahun 2026, menjelaskan bahwa target 2026 berdasarkan program kegiatan rutin ditargetkan 100% untuk mendapatkan hasil fisik yang optimal, sedangkan untuk program yang spesifik Dinas Sosial menargetkan persentase dalam kondisi maju akan mencapai 100% dengan total anggaran Rp. 21.037.500.000,-. Sedangkan diperkirakan maju hingga tahun 2027 dengan total anggaran spesifik sebesar Rp. 21.716.362.222,-.

Tabel TC.33

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026**

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						21.037.500 .000,00							21.716.362. 222,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.037.500 .000,00							21.716.362. 222,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						21.037.500 .000,00							21.716.362. 222,00	
1,	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100 Persen	100 Persen	100 Pers en	11.496.805 .218,00						-	11.822.070. 393,00	
	1.06.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-				681.964.63 2,00			-	-	-	-	771.640.00 0,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.1.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		1 Dok	1 Dok	1 Dok	571.766.63 2,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		583.780.00 0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		3 Lap	1 Lap	4 Lap	110.198.00 0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		187.860.00 0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.169.143. 542,00			-	-	-	-	8.970.133.3 93,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		70 Org	71 Org	70 Org/ Bln	9.021.821. 998,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.839.136.3 93,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		1 Dok	1 Dok	1 Dok	123.321.54 4,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		106.757.00 0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		1 Lap	1 Lap	1 Lap	24.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.240.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						120.049.000,00			-	-	-	-	159.681.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>		1 Paket	71 Paket	70 Paket	31.350.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		28.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>		15 Org	4 Org	10 Orang	68.812.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		111.201.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		160 Org	-	70 Orang	19.887.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-				118.243.600,00			-	-	-	-	135.946.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.445.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.140.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	1 Paket	1 Paket	16.591.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		3 Paket	1 Paket	3 Paket	21.433.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		6 Paket	1 Paket	1 Paket	17.164.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 6.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>		1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.050.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>		1 Lap	1 Lap	1 Lapo ran	31.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.885.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		1 Lap	1 Lap	1 Lapo ran	16.360.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.271.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						749.846.440,00			-	-	-	-	727.907.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		2 Lap	1 Lap	1 Lapo ran	235.584.128,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		242.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		3 Lap	1 Lap	2 Lapo ran	514.262.316,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		485.507.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						657.558.000,00			-	-	-	-	501.263.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.01.1.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.650.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	14 Unit	12 Unit	359.450.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		323.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		55 Unit	55 Unit	55 Unit	55.970.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.813.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	4 Unit	201.488.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.400.000,00	DINAS SOSIAL

2,	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	-	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Pers en 100 Pers en	841.643.08 8,00						-	1.349.966.0 00,00		
	1.06.02.1.0 1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						88.660.772 ,00					-	Masyar akat Umum	-	137.966.00 0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		6 Dok	6 Dok	6 Doku men	88.660.772 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Umum		137.966.00 0,00	DINAS SOSIAL	

	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	-	77 Org 92 Lembaga	77 Org 25 Lembaga	35 Lembaga 77 Keluarga	752.982.31 6,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Lembaga	-	1.212.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		77 Org	77 Org	77 Keluarga	752.982.31 6,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Lembaga		808.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi		92 Lembaga	25 Lembaga	35 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertambahan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Lembaga		404.000.000,00	DINAS SOSIAL

3,	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	-	100 Persen	100 Persen	100 Pers en	133.357.54 4,00						-	147.195.92 9,00	
	1.06.03.1.0 1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						133.357.54 4,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Umum	-	147.195.92 9,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.0 1.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota		6 Org	10 Org	15 Oran g	133.357.54 4,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Umum		147.195.92 9,00	DINAS SOSIAL
4,	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	100 Persen	100 Persen	100 Pers en	3.697.042. 576,00						-	2.507.830.0 00,00	

	1.06.04.1.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	<i>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui rehabilitasi sosial didalam panti</i>	-	4 Org	10 Org	12 Oran g	499.610.31 6,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin	-	381.780.00 0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 1.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>		4 Org	10 Org	12 Oran g	196.218.00 0,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin		151.500.00 0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 1.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>		4 Org	10 Org	12 Oran g	15.000.000 ,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin		20.200.000, 00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 1.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														

			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>		4 Org	10 Org	12 Orang	20.724.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		49.490.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>		4 Org	10 Org	12 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		5.050.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>		4 Org	10 Org	12 Orang	200.330.316,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		101.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>		4 Org	10 Org	12 Oran g	4.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin		4.040.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar</i>		1 Dok	1 DOK	1 Doku men	59.338.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin		50.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	<i>Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</i>	-	45 Org	45 Org	50 Oran g	1.181.776.316,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin	-	802.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														

			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		45 Org	45 Org	50 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		45.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		45 Org	45 Org	50 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Masyarakat Miskin		10.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		45 Org	45 Org	50 Orang	32.203.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		40.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>		45 Org	45 Org	50 Orang	12.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		30.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 2.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>		45 Org	45 Org	50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		20.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 2.0015	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>		45 Org	45 Org	50 Orang	864.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		505.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 2.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</i>		1 Dok	1 Dok	1 Dokumen	193.923.316,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		151.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	<i>Jumlah Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti</i>	-	23 Org	23 Org	25 Orang	1.443.761.172,40			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin	-	1.105.950.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>		23 Org	23 Org	25 Orang	425.865.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		303.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>		23 Org	23 Org	25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		80.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses														
			<i>Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi</i>		23 Org	23 Org	25 Orang	169.999.996,40	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		151.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi</i>		23 Org	23 Org	25 Orang	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		4.040.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														

			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi</i>		23 Org	23 Org	25 Orang	208.112.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		186.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>		23 Org	23 Org	25 Orang	346.786.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		222.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>		6 Org	23 Org	25 Orang	51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		50.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														

			<i>Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi</i>		2 Org	2 Org	4 Oran g	20.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin		20.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 3.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi</i>		23 Org	23 Org	25 Oran g	6.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin		6.060.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 3.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi</i>		1 Dok	1 Dok	1 Doku men	111.998.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat Miskin		80.800.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	<i>Jumlah gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial di dalam panti</i>	-	-	-	11 Orang	433.443.455,60			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Masyarakat Miskin	-	176.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>		-	-	11 Orang	98.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Masyarakat Miskin		70.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi</i>		-	-	11 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Masyarakat Miskin		10.100.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.04.1.0 4.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses														
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi		-	-	11 Oran g	146.399.600,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap p erlindungan sosial dan pemberday aan ekonomi yang terintegrasi, komprehen sif, dan inklusif	Masyar akat Miskin		0.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 4.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		-	-	11 Oran g	9.080.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap p erlindungan sosial dan pemberday aan ekonomi yang terintegrasi, komprehen sif, dan inklusif	Masyar akat Miskin		0.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.0 4.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi</i>		-	-	11 Orang	137.025.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Masyarakat Miskin		0.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</i>		-	-	1 Dokumen	27.106.311,60	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Masyarakat Miskin		25.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti				-		138.451.316,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin	-	40.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA</i>		3 Dok	1 Dok	1 Dokumen	138.451.316,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		40.400.000,00	DINAS SOSIAL
5,	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	-	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	8,77 Persen 16,99 Persen	3.086.872.994,00						-	4.046.969.000,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>	-	17 Org	15 Org	17 Orang	91.824.002,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	117.261.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														

			<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi</i>		17 Org	15 Org	17 Orang	91.824.002,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		117.261.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						2.995.048.992,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif	Masyarakat Miskin	-	3.929.708.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi</i>		23000 KPM	9000 KPM	4200 Orang	1.581.964.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		3.138.575.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota</i>		532 KPM	500 Org	550 Orang	1.413.084.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Miskin		655.793.000,00	DINAS SOSIAL
6,	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi</i>	-	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.369.277.176,00						-	1.304.202.900,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	<i>Jumlah warga negara korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya masa tanggap Darurat</i>	-	54.094 Org	6000 Org	2200 Orang	1.369.277.176,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	1.304.202.900,00	DINAS SOSIAL

	1.06.06.1.0 1.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi		54.094 Org	6000 Org	2200 Oran g	1.174.221.176,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat		826.180.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.0 1.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		90 Org	100 Org	100 Oran g	55.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat		73.730.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.0 1.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi		-	100 Org	100 Oran g	15.000.000,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat		15.442.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.0 1.0011	Penyediaan Sandang														

			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi</i>		450 Org	500 Org	1000 Orang	62.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		247.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi</i>		2 Unit	1 Unit	1 Unit	62.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		141.400.000,00	DINAS SOSIAL
7,	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik</i>	-	100 Persen	100 Persen	100 Persen	412.501.404,00						-	538.128.000,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	<i>Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi dan memperoleh pemeliharaan sarana dan prasarana</i>	-	2 Makam	2 Makam	2 Makam	412.501.404,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat	-	538.128.000,00	DINAS SOSIAL

	1.06.07.1.0 1.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>		2 Makam	2 Makam	2 Makam	412.501.404,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	-	Masyar akat		538.128.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							21.037.500.000,00							21.716.362.222,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo mengacu kepada target capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo guna mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Tahun 2026 sebagai berikut :

1. DINAS SOSIAL		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	571.766.632
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.198.000
1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Daerah		
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.021.821.998
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	123.321.544
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000
1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.350.000
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.812.000
1.06.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.887.000
1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banunan Kantor	10.445.000
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.591.350
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.433.000
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.164.250
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.250.000
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.000.000
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.360.000
1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	235.584.128
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	514.262.316
1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.650.000
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.450.000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.970.000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.488.000
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		
1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	88.660.772
1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	752.982.316
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	-
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN KEKERASAN		
1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	133.357.544
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	196.218.000
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	15.000.000
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	20.724.000
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	4.000.000
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Sehari-hari	200.330.316
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.000.000
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	59.338.000
1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	864.450.000
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	75.000.000
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di	4.000.000

	dalam Panti	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	32.203.000
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	12.200.000
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-
1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	193.923.316
1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
1.06.04.1.03 .0001	Penyediaan Permakanan	425.865.000
1.06.04.1.03 .0002	Penyediaan Sandang	100.000.000
1.06.04.1.03 .0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	169.999.996
1.06.04.1.03 .0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	4.000.000
1.06.04.1.03 .0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	208.112.000
1.06.04.1.03 .0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	346.786.176
1.06.04.1.03 .0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	6.000.000
1.06.04.1.03 .0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	51.000.000
1.06.04.1.03 .0012	Pemulasaraan	20.000.000
1.06.04.1.03 .0017	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	111.998.000
1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	98.832.000
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	15.000.000
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	146.399.600
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosia	9.080.000
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	137.025.544
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant	27.106.311
1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		
1.06.04.1.05 .0011	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	138.451.316
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang tua Tunggal		
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan anak antar WNI	91.824.002
1.06.04.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
1.06.05.1.02 .0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.581.964.632
1.06.05.1.02.0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.413.084.360
1.06.05.1.02 .0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan	-

	Ekonomi Masyarakat	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan permakanan	1.174.221.176
	1.06.06.1.01.0011 Penyediaan sandang	62.500.000
	1.06.06.1.01.0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	62.556.000
	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	55.000.000
	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	412.501.404

BAB V

PENUTUP

4. Catatan Penting yang perlu menjadi perhatian

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 disusun sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan rencana kerja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan sub kegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU maupun IKK. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan, akan tetapi tetap mempertimbangkan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra.

5. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur pada perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, maka unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja yang sudah ditetapkan.

6. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut maka rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;
- b. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis dll;
- d. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
- e. Memberikan reward dan punishment yang berkeadilan sesuai performa masing-masing.



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DINAS SOSIAL

*Jl. Brigjen Plola Isa, Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
Telp/Fax. (0435) 827061*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO NOMOR : 400.9/DINSOS/SK/731/IV/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun rencana kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang disebut dengan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026;
- b. bahwa untuk optimalnya penyusunan Rencana Kerja OPD Provinsi Gorontalo dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007-2025;
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Provinsi ;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas melaksanakan tahapan persiapan penyusunan RENJA, Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Penetapan Renja yang mencakup :
1. Kepala Dinas bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta pembinaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;
 2. Sekretaris bersama tim sekretariat bertugas :
 - a. Mengontrol pelaksanaan tugas kelompok kerja.
 - b. Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan;
 - c. Melaksanakan pertemuan yang antara lain membahas hal-hal yang perlu dilakukan;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan penyusunan renja kepada ketua tim.
 3. Tugas Kepala Bidang, mencakup :
 - a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan materi Renja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
 - b. Melakukan penulisan narasi dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
 - c. Melaksanakan pertemuan yang membahas hal-hal yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : April 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI GORONTALO



SAGITA WARTABONE, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP 197111052002122006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
Nomor : 400.9/DINSOS/SK/731/IV/2025
Tanggal : April 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun
2026

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026**

1. Ketua : Kepala Dinas
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas
3. Kelompok Kerja :

Kelompok Pemberdayaan Sosial

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Anggota : Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial

Kelompok Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial
Anggota : Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial

Kelompok Perlindungan dan Jaminan Sosial

Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Anggota : Pejabat Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kelompok Rehabilitasi Sosial

Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Anggota : Pejabat Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial

Tim Sekretariat

Ketua : Pejabat Fungsional Perencana
Anggota : - Pejabat Eselon IV dilingkungan Sekretariat
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
- Fungsional Umum dilingkungan Sekretariat

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : April 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI GORONTALO**



SAGITA WARTABONE, ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP 197111052002122006